

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan unit bisnis yang keberadaanya tak dapat dilepas dari lingkungan masyarakat sekitar, kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, bukan mengorbankan manusia dan masyarakatnya demi tercapai tujuan pembangunan. Pengorbanan harus memperoleh manfaat dari hasil pembangunan baik ekonomis maupun non ekonomis yang lebih besar dibanding pengorbanan yang telah diberikan, di lain pihak harus jelas bahwa berkorbanlah yang harus lebih diutamakan sebagai penerima utama manfaat atau hasil pembangunan bukan sebaliknya yang berkorban memang sengaja dikorbankan demi kepentingan pihak lain yang justru tidak pernah mengeluarkan pengorbanan apapun. Dari kegiatannya perusahaan telah membantu pemerintah dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun fasilitas ekonomi.<sup>1</sup>

Hal ini diperlihatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I pasal 2 dinyatakan, bahwa *“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan*

---

<sup>1</sup>Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta cvi, hlm.12

*ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*”Undang-undang tersebut secara eksplisit dan implisit memberikan mandat dan arahan bagi pelaku bisnis (perusahaan) untuk tidak melihat orientasi dari perspektif ekonomi rasional semata tetapi mereka juga harus menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dalam kerangka tanggung jawab terhadap etika legal (sesuai perundangan) dan mengedepankan kesusilaan termasuk nilai dalam masyarakat bahwa perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya dengan tidak melihat keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Diperkuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa *“Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”*Seperti yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa *“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan, lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”*.

---

<sup>2</sup> Nor Hadi, 2011, *Social Responsibility Antara Opportunity Atau Pengorbanan SumberDaya Bagi Perusahaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.26

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau sering disebut Corporate Social responsibility (CSR) diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hal ini belakangan menjadi trend baru perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan CSR dengan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.<sup>3</sup> Banyak perusahaan multi-nasional yang bekerja sama dengan LSM untuk mengembangkan strategi *Corporate Social Responsibility / CSR*.<sup>4</sup>

Dalam pasal 74 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*” Dan dalam pasal 74 ayat 3 menyatakan bahwa “*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Suatu perusahaan dapat mewujudkan CSR dengan baik apabila mereka mampu menerapkan kewajibannya secara berimbang antara kepentingan *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. *Stakeholder primer* merupakan kelompok yang

---

<sup>3</sup>Vredy Viky, 2016, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Pada PT. Tirta Investama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>4</sup>Totok Mardikanto, *op.cit*, hlm.83

secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan barang dan jasa kepada masyarakat, sedangkan *stakeholder sekunder* adalah semua kelompok dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh dampak sekunder beroperasinya suatu perusahaan. Dan apabila suatu perusahaan tidak mampu menciptakan keseimbangan kepentingan diantara kedua kelompok stakeholder tersebut akibatnya bisa menimbulkan konflik sosial.<sup>5</sup>

PT.Index sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu menjadi mebel (furniture) yang berkedudukan di Jl. Raya Telukan No.54 Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, melihat pada kebutuhan yang ada maka usaha mebel (furniture) bukan hanya memberikan keuntungan internal perusahaan namun juga membawa dimana di dalam operasi kegiatannya sadar bahwa apapun yang dilakukan atas kegiatan usaha akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada menjadi salah satu tanggung jawab dalam perwujudannya dalam menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Diantara pelaksanaan CSR yang telah dilakukan oleh PT.Index antara lain di bidang lingkungan dengan melalui proyek penanaman pohon yang mempunyai program “Menabung Pohon” di wilayah Surakartaterdiri atas dua model yaitu menabung pohon untuk kelestarian lingkungan (menanam bukan untuk ditebang) model kedua

---

<sup>5</sup>Anggara Satria Putra, 2015, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Jurnal Nominal, Volume 4, Nomor 2, hlm. 88

adalah menabung pohon untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendatangkan nilai ekonomi yang dilakukan bersama LSM Protonema, lalu di bidang pendidikan dengan memberikan bantuan pengembangan sekolah alam Bengawan Solo, serta di bidang fasilitas sarana dan prasarana umum di wilayah sekitar tersebut dalam memberikan bantuan dalam bentuk perbaikan jalan, penerangan, dalam bulan ramadhan terdapat zakat fitrah untuk masyarakat, mendukung kegiatan karang taruna di kawasan perusahaan berdiri. Maka berawal dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOCIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. INDEX**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini, untuk menentukan ruang lingkup maupun obyek penelitian sehingga kajian dapat dilaksanakan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang dikaji, serta menghindari perluasan masalah agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis mencoba untuk melakukan untuk memberikan pembatasan pembahasan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada analisis bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan PT Index dalam kepedulian terhadap lingkungan

dan masyarakat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Index ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. BagaimanapelaksanaanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh PT.Indexdalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- b. Apakah PT. Indextelah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahamibagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Index terhadap pemberdayaan kepedulian lingkungan maupun masyarakat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya pengelolaan yang dilakukan oleh PT.Index dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum perusahaan, terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR terhadap kepedulian lingkungan maupun masyarakat sekitar perusahaan.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti terkait pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (CSR) kepada lingkungan maupun masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya<sup>6</sup>. Bowem mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>7</sup> Jelas bahwa tujuan CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan di dalam pasal 3, 10, 15, 16, 17, 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Masalah kepastian hukum sangat penting bagi Direksi PT yang bertanggung jawab dalam mengurus perseroan sebagaimana direksi selaku organ PT hanyalah berpatokan pada usaha pokok dan kegiatan usaha yang dielaborasi dalam anggaran dasar PT dan apabila anggaran dasar perseroan jelas menyebut kegiatan usaha perseroan di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka direksi dalam menjalankan amanat yang dinyatakan dalam pasal 74 ayat 1 UUPT tidak punya alasan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>8</sup>

Dimana pengkategorian perusahaan yang dibebankan tanggung jawab untuk menerapkan CSR yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, adapula perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dimana perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Bahwa Tujuan pembentukan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1

<sup>7</sup>Totok Mardikanto, *op.cit.*, hlm. 86

<sup>8</sup>Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 103



CSR bagi PT dalam UUPT yaitu menitikberatkan pada penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika kelalaian Direksi dalam menerapkan CSR akan dihadapkan kepada sanksi tanggungjawab pribadi anggota sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT dan bagi PT yang bersangkutan tentunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan sesuai amanat pasal 74 ayat 4.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitiandisebut dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara objektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.<sup>10</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yaitu PT. Index.

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 98

<sup>10</sup>Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, hlm.26

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah dilihat dari sifatnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapat hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perlindungan konsumen dalam pencantuman label halal yang tidak tersertifikasi.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh dari sumber utama yaitu hasil cara wawancara berdasarkan fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari pihak terkait dengan obyek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder bahan hukum yang berisi ketentuan hukum mengikat dan tertulis yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan:
  - a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - b) Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang tanggung

Jawab Sosial Lingkungan

---

<sup>11</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.25

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan mendukung bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan yang didapat dari internet.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti.

### b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait yang menangani obyek perkara yang diteliti.

## 6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan diolah menguraikannya dalam

bentuk kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang adasehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, skripsi ini disusun dalam format empat bab selanjutnya didapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan teori-teori yang menjadi tinjauan umum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab pelaksanaan perusahaan PT. Index terhadap kepedulian lingkungan maupun masyarakat serta mengenai pelaksaan audit yang dilakukan pada PT.Index.

BAB IV berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.

Daftar Pustaka